**PAJAK: KUNCI MENUJU INDONESIA EMAS 2045**

***TAX: THE KEY TO A GOLDEN INDONESIA 2045***

Fariel Zulfikar Alman1, Gabriel Choirul Alman2, Rianto3, Lukman Yudho Prakoso4

Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia1, Universitas Brawijaya2, Institut Pariwisata Trisakti3, Unhan RI4

(farielalman@gmail.com1, gabrielchoirul@student.ub.ac.id2, rianto@iptrisakti.ac.id3, lukman.prakoso@idu.ac.id4)

**Abstrak (Bahasa Indonesia)** –Pajak memainkan peran krusial dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, dan pengentasan kemiskinan, berfungsi sebagai pemasukan utama negara yang tidak tergantikan. Namun, optimalisasi penerimaan pajak di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan multidimensional. Tantangan tersebut termasuk rendahnya tingkat kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak, kendala administratif yang menghambat efisiensi pengumpulan pajak, serta permasalahan dalam sistem pengawasan yang mengurangi akuntabilitas dan transparansi. Artikel ini bertujuan untuk mengulas secara mendalam pentingnya peran pajak dalam usaha mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, sebuah visi ambisius yang mencakup berbagai aspek kemajuan ekonomi dan sosial bangsa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur artikel,dokumen dan aturan yang berkaitan dengan pajak di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan penerimaan pajak, seperti reformasi sistem perpajakan yang menyeluruh, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam administrasi pajak untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi, serta edukasi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak. Melalui implementasi langkah-langkah strategis ini, diharapkan penerimaan pajak dapat dioptimalkan secara signifikan, sehingga mendukung pembiayaan pembangunan nasional secara berkelanjutan dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang mencakup pembangunan berkelanjutan, kesejahteraan yang merata, dan daya saing global.

**Kata Kunci**: Indonesia Emas 2045, Optimal, Pajak, Penerimaan Negara

***Abstract (English)*** *– Taxes play a crucial role in infrastructure development, improving the quality of public services, and alleviating poverty, serving as the state's primary irreplaceable revenue source. However, optimising tax revenue in Indonesia faces various complex and multidimensional challenges. These challenges include low tax compliance among taxpayers, administrative hurdles that impede the efficiency of tax collection, and issues within the supervisory system that diminish accountability and transparency. This article aims to thoroughly review the importance of the role of taxes in the effort to realise the Vision of Golden Indonesia 2045, an ambitious vision encompassing various aspects of the nation's economic and social progress. The method used in this research is a literature study of articles, documents, and regulations related to taxation in Indonesia. The research results indicate that various strategies can be implemented to increase tax revenue, such as comprehensive tax system reforms, the application of information and communication technology in tax administration to enhance efficiency and accuracy, and public education to improve tax awareness and compliance. By implementing these strategic measures, it is hoped that tax revenue can be significantly optimised, thus supporting the sustainable financing of national development and realising the Vision of Golden Indonesia 2045, which includes sustainable development, equitable welfare, and global competitiveness.*

***Keywords:*** *Golden Indonesia 2045, Optimal, Taxes, State revenue*

**PENDAHULUAN**

Kekuatan geopolitik ekonomi tengah bergeser dari Dunia Barat ke Asia, Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan posisi globalnya (Arto, Prakoso LY, 2019). Kepentingan negara-negara yang berada di kawasan regional maupun global juga perlu menjadi perhatian termasuk Indonesia (Listiyono, Prakoso LY, 2019). Dalam konteks ini, visi Indonesia Emas 2045 menggambarkan sebuah masa depan di mana Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia, dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan daya saing global yang kuat (World Bank, 2021). Untuk mencapai visi ambisi ini, berbagai aspek pembangunan nasional perlu diperkuat, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor strategis lainnya (Ardianto, 2018).

Pajak sebagai sumber utama pendapatan negara memegang peranan vital dalam membiayai program pembangunan untuk mencapai tujuan besar, sementara pemerintah menggunakan stimulus fiskal sebagai bentuk intervensi dalam menstabilkan perekonomian (Saputro, Prakoso LY, 2021).

Namun, perjalanan menuju optimalisasi penerimaan pajak di Indonesia tidaklah mudah. Selama ini, Indonesia kehilangan banyak sekali peluang ekonomi (Prasetyo, Prakoso LY, 2019). Berbagai tantangan menghadang, mulai dari rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, ketidakoptimalan sistem administrasi pajak, hingga isu-isu terkait pengawasan dan penegakan hukum. Menghadapi tantangan ini, pemerintah Indonesia perlu menerapkan berbagai strategi dan kebijakan yang efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak. Reformasi sistem perpajakan, digitalisasi administrasi pajak, dan peningkatan kesadaran pajak di kalangan masyarakat adalah beberapa langkah penting yang dapat diambil (Basri, 2017).

Artikel ini akan membahas peran strategis pajak dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045, tantangan yang dihadapi dalam optimalisasi penerimaan pajak, serta strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut. Dengan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya pajak dan upaya yang tepat untuk meningkatkan penerimaannya, Indonesia dapat memastikan tersedianya sumber daya finansial yang memadai untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif.

**METODE**

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adaah sebagai berikut.

1. **Studi Literatur**

Metode penelitian studi literasi adalah pendekatan penelitian yang mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai literatur yang relevan untuk memahami suatu topik atau fenomena tertentu. Penelitian ini biasanya tidak melibatkan eksperimen atau pengumpulan data lapangan, melainkan berfokus pada sumber-sumber tertulis yang ada seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen lainnya. Adapun penggunaan metode ini memiliki keuntungan sebagai berikut :

1. Mendalam dan Komprehensif. Memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan mengkaji informasi yang luas dan mendalam dari berbagai sumber.
2. Biaya dan Waktu. Tidak memerlukan biaya dan waktu untuk pengumpulan data lapangan.
3. Mengidentifikasi Kesenjangan Penelitian. Dapat membantu menemukan area yang belum banyak diteliti dan membutuhkan penelitian lebih lanjut.

Namun, ada beberapa keterbatasan dalam penggunaan metode ini yaitu :

* 1. Keterbatasan Data: Tergantung pada ketersediaan dan aksesibilitas literatur yang relevan.
	2. Bias Subjektif: Pemilihan dan interpretasi literatur dapat dipengaruhi oleh bias subjektif peneliti.
	3. Tidak Ada Data Primer: Tidak melibatkan pengumpulan data primer sehingga mungkin tidak mencerminkan kondisi terkini atau spesifik.
1. **Analisis Kebijakan**

Metode penelitian analisis kebijakan adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi kebijakan publik yang ada atau yang diusulkan. Metode ini bertujuan untuk memahami bagaimana kebijakan dibentuk, diimplementasikan, dan berdampak pada masyarakat serta institusi terkait. Adapun keuntungan dari penggunaan metode ini adalah sebagai berikut :

* 1. Memahami Proses Kebijakan: Memungkinkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kebijakan dibuat, diimplementasikan, dan dievaluasi. Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak (Kurniawan, Prakoso LY, 2018)
	2. Memberikan Rekomendasi yang Berbasis Bukti: Rekomendasi kebijakan didasarkan pada analisis data yang obyektif dan evaluasi yang komprehensif.
	3. Mendorong Perbaikan Kebijakan: Membantu mengidentifikasi kelemahan dalam kebijakan yang ada dan memberikan saran untuk perbaikan atau perubahan.

Keterbatasan dari penggunaan metode ini adalah sebagai berikut :

* 1. Keterbatasan Data: Keterbatasan data yang tersedia dapat membatasi analisis kebijakan.
	2. Subjektif: Interpretasi dan analisis kebijakan dapat dipengaruhi oleh bias subjektif peneliti.
	3. Kompleksitas Konteks Kebijakan: Konteks kebijakan yang kompleks dapat membuat analisis dan evaluasi menjadi lebih sulit.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

* + 1. **Peran Pajak**

Pajak memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk fondasi ekonomi dan sosial suatu negara. Dalam konteks Indonesia, perpajakan menjadi instrumen kunci dalam mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045, yaitu sebuah visi yang menetapkan Indonesia sebagai negara maju dengan perekonomian yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Berikut ini beberapa aspek penting dari peran pajak dalam mencapai tujuan tersebut:

1. **Sumber Pendapatan Negara**

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Dalam kerangka Indonesia Emas 2045, peningkatan pendapatan pajak menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa negara memiliki cukup dana untuk (DJP, 2022) :

* 1. Membangun dan memelihara infrastruktur yang modern dan efisien.
	2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan aksesibilitasnya bagi seluruh masyarakat.
	3. Menyediakan layanan kesehatan yang memadai dan merata.
	4. Memperkuat sistem keamanan nasional.
1. **Pendorong Pembangunan Infrastruktur**

Infrastruktur yang baik adalah tulang punggung dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dana yang diperoleh dari pajak dapat digunakan untuk investasi dalam pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, serta infrastruktur digital seperti jaringan internet berkecepatan tinggi. Infrastruktur yang memadai tidak hanya meningkatkan efisiensi ekonomi tetapi juga menarik investasi asing, yang pada gilirannya dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan (Fahmi, 2019).

1. **Redistribusi Kekayaan dan Pengurangan Ketimpangan**

Salah satu fungsi utama pajak adalah redistribusi kekayaan. Melalui mekanisme perpajakan yang progresif, pemerintah dapat mengumpulkan dana lebih dari individu dan perusahaan yang lebih mampu dan mendistribusikannya kembali dalam bentuk program kesejahteraan sosial, subsidi, dan layanan publik. Hal ini penting untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi (Fahmi, 2019).

1. **Stabilitas Ekonomi**

Pajak juga berfungsi sebagai alat untuk menjaga stabilitas ekonomi. Dengan mengatur tingkat pajak dan penerimaannya, pemerintah dapat mempengaruhi tingkat konsumsi dan investasi dalam perekonomian. Misalnya, dalam kondisi ekonomi yang melesu, pemerintah dapat memberikan insentif pajak untuk merangsang investasi dan konsumsi. Sebaliknya, dalam kondisi ekonomi yang terlalu panas, pajak dapat ditingkatkan untuk mencegah inflasi. Terlebih lagi Sampai tahun 2020, Kawasan ASEAN akan menunjukkan pertumbuhan pendapatan domestik bruto (*gross domestic products*-GDP) yang menggembirakan dengan tumbuh sekitar 50% senilai lebih US$ 5,000 bn (Ali, Prakoso LY, 2020).

1. **Pendanaan Riset dan Inovasi**

Dewasa ini, kita berada dalam sebuah era teknologi komunikasi dan informasi (Kusuma, Prakoso LY, 2021). Untuk mencapai status negara maju pada tahun 2045, Indonesia perlu berinvestasi dalam riset dan inovasi. Pajak dapat digunakan untuk mendanai penelitian dan pengembangan (R&D) di berbagai sektor, termasuk teknologi informasi, kesehatan, dan energi terbarukan. Dengan mendorong inovasi, Indonesia dapat meningkatkan daya saing globalnya dan menciptakan industri-industri baru yang berkelanjutan. Peningkatan industri telah mendorong pertumbuhan ekonomi umum. Sektor industri menggunakan energi paling banyak dari semua bentuk sumber daya minyak bumi, gas alam, dan batu bara yang digunakan sebagai penghasil listrik untuk berkendara peralatan Industri (Dipua, Prakoso LY, 2020)

1. **Mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Kebijakan perpajakan yang mendukung UMKM, seperti insentif pajak atau tarif pajak yang lebih rendah, dapat membantu mereka untuk berkembang dan bersaing di pasar global. Dukungan ini sangat penting untuk mendorong inklusi ekonomi dan menciptakan lapangan kerja (Mankiw, 2017).

1. **Mendorong Kepatuhan dan Transparansi**

Pajak juga berperan dalam mendorong budaya kepatuhan dan transparansi. Dengan sistem perpajakan yang adil dan efisien, masyarakat akan lebih termotivasi untuk membayar pajak. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa penggunaan dana pajak transparan dan akuntabel, sehingga meningkatkan kepercayaan publik. Mengenai masalah transparansi, kontrol dan sistem akuntabilitas secara umum masih menjadi pekerjaan rumah bagi setiap orang sektor kementerian dan lembaga yang ada di Indonesia saat ini (Prihantoro, Prakoso LY, et al., 2021).

1. **Pembiayaan Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan**

Sebagai bagian dari komitmen untuk mencapai Indonesia Emas 2045, pajak dapat diarahkan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Ini termasuk pajak karbon, insentif untuk energi terbarukan, dan pendanaan proyek-proyek yang berwawasan lingkungan. Langkah-langkah ini penting untuk mengatasi perubahan iklim dan memastikan pembangunan yang ramah lingkungan

Peran pajak dalam mencapai Indonesia Emas 2045 sangatlah strategis dan multifaset. Melalui optimalisasi penerimaan pajak, pembangunan infrastruktur, redistribusi kekayaan, serta investasi dalam riset dan inovasi, Indonesia dapat mewujudkan visi sebagai negara maju yang inklusif dan berdaya saing global. Kebijakan perpajakan yang tepat, transparan, dan akuntabel akan menjadi kunci dalam mencapai tujuan tersebut.

* + 1. **Kekurangan dalam Sistem Pajak Indonesia**

Meskipun memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional dan mencapai tujuan Indonesia Emas 2045, sistem pajak di Indonesia masih menghadapi beberapa kekurangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensinya. Berikut adalah beberapa kekurangan utama:

1. **Tingkat Kepatuhan Pajak yang Rendah**

Tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Ditambah lagi dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang relative berada dalam tingkat kesejahteraan rendah. Kondisi masyarakat yang dimaksud antara lain pendidikan, ekonomi dan kultur yaitu budaya, watak dan kebiasaan dari kebanyakan masyarakat (Supriyono, Prakoso LY, 2019). Hal tersebut memicu banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan atau membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya kesadaran pajak, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, dan adanya celah dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum.

1. **Basis Pajak yang Sempit**

Basis pajak di Indonesia masih relatif sempit, dengan sebagian besar penerimaan pajak berasal dari sektor formal dan perusahaan besar. Sementara itu, sektor informal yang sangat besar di Indonesia belum sepenuhnya terjangkau oleh sistem pajak. Hal ini menyebabkan potensi penerimaan pajak yang belum optimal.

1. **Ketergantungan pada Pajak Tidak Langsung**

Sistem pajak Indonesia cenderung lebih mengandalkan pajak tidak langsung, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), daripada pajak langsung seperti Pajak Penghasilan (PPh). Pajak tidak langsung seringkali bersifat regresif dan dapat membebani masyarakat berpenghasilan rendah, sementara pajak langsung lebih progresif dan adil (Schwab, 2016).

1. **Administrasi Pajak yang Kurang Efisien**

Efisiensi administrasi perpajakan di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Proses administrasi yang rumit dan birokratis seringkali menyulitkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Sistem teknologi informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi juga menjadi kendala dalam pengelolaan data dan pelaporan pajak (Romer, 1990).

1. **Korupsi dan Transparansi**

Korupsi dalam administrasi pajak masih menjadi masalah serius di Indonesia. Praktik-praktik koruptif dalam proses penagihan dan pemeriksaan pajak dapat mengurangi efektivitas sistem pajak dan menurunkan kepercayaan publik. Selain itu, kurangnya transparansi dalam pengelolaan penerimaan pajak dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat (Piketty, 2014).

1. **Kesenjangan Antardaerah**

Terdapat kesenjangan dalam penerimaan pajak antardaerah di Indonesia. Daerah-daerah yang lebih maju secara ekonomi, seperti Jakarta dan Bali, cenderung menyumbang lebih banyak pajak dibandingkan daerah-daerah yang kurang berkembang. Hal ini dapat memperlebar kesenjangan pembangunan antar wilayah di Indonesia (Haryanto, 2018).

* + 1. **Strategi untuk Mengoptimalkan Sistem Pajak Indonesia**

Berdasarkan masalah-masalah di atas, perlu ada perbaikan dalam sistem pajak Indonesia supaya lebih optimal. Pengoptimalan sistem pajak akan mempermudah usaha untuk menuju Indonesia Emas 2045. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diimplementasikan untuk mengoptimalkan sistem pajak Indonesia:

1. **Reformasi Perpajakan**
2. **Penyederhanaan Sistem Pajak**

Simplifikasi aturan dan regulasi perpajakan untuk memudahkan wajib pajak dalam memahami dan memenuhi kewajiban mereka. Mengurangi birokrasi dan mempercepat proses administrasi pajak.

1. **Peningkatan Basis Pajak**

Memperluas basis pajak dengan mengintegrasikan sektor informal ke dalam sistem perpajakan. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui edukasi dan kampanye kesadaran pajak (Susilawati, 2019).

1. **Penggunaan Teknologi Informasi**
2. **Digitalisasi Administrasi Pajak:**

Mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi administrasi pajak, seperti *e-filing, e-payment*, dan sistem pelaporan *online*. Mengembangkan database terpadu yang mengintegrasikan data dari berbagai instansi untuk mengidentifikasi wajib pajak yang tidak patuh (Harjanto, 2020).

1. ***Big Data* dan Analisis**

Menggunakan analisis *big data* untuk memantau dan menganalisis aktivitas ekonomi serta mengidentifikasi potensi pajak yang belum tergali. Menerapkan sistem pengawasan otomatis yang dapat mendeteksi anomali dan potensi kecurangan pajak (Ardianto, 2020).

1. **Penguatan Penegakan Hukum**
2. **Penegakan Hukum yang Ketat**

Memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparat penegak hukum. Menerapkan sanksi yang lebih tegas dan memberikan insentif bagi pelaporan pelanggaran pajak (Prasetyo, 2018).

1. **Transparansi dan Akuntabilitas**

Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan penerimaan pajak dan pengeluaran negara untuk membangun kepercayaan publik.

Mengimplementasikan sistem audit yang independen dan transparan.

1. **Kebijakan Pajak yang Progresif**
2. **Pajak Berkeadilan**

Menerapkan kebijakan pajak yang lebih progresif untuk memastikan kontribusi yang lebih besar dari wajib pajak dengan kemampuan ekonomi yang lebih tinggi. Mengurangi beban pajak bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pengenalan insentif pajak dan pengurangan tarif pajak (Kemenkeu, 2021).

1. **Insentif Pajak untuk Sektor Strategis**

Memberikan insentif pajak untuk investasi di sektor-sektor strategis seperti teknologi, infrastruktur, dan pendidikan. Mendorong inovasi dan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) melalui kebijakan pajak yang mendukung (Susanto, 2019)

1. **Peningkatan Kerja Sama Internasional**
2. **Perjanjian Perpajakan Internasional**

Mengembangkan perjanjian perpajakan dengan negara-negara lain untuk menghindari penghindaran pajak dan *transfer pricing*. Berpartisipasi aktif dalam inisiatif global untuk transparansi pajak dan pertukaran informasi (OECD, 2021).

1. **Kolaborasi dan Best Practices:**

Meningkatkan kerja sama dengan negara lain untuk berbagi best practices dalam administrasi dan kebijakan perpajakan.

Mengadopsi standar internasional dalam pelaporan dan pengawasan pajak (IMF, 2021).

Optimalisasi sistem pajak merupakan kunci untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Melalui reformasi perpajakan yang menyeluruh, penggunaan teknologi informasi, penguatan penegakan hukum, penerapan kebijakan pajak yang progresif, dan peningkatan kerja sama internasional, Indonesia dapat meningkatkan pendapatan pajak secara signifikan. Pendapatan yang lebih tinggi ini akan memungkinkan pemerintah untuk mendanai berbagai program pembangunan yang esensial, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Kesimpulan Rekomendasi dan Pembatasan**

Pajak memiliki peran krusial dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Sebagai sumber pendapatan utama negara, pajak mendanai berbagai program pembangunan yang esensial untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Melalui pajak, pemerintah dapat memperkuat infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta mendorong inovasi dan pengembangan teknologi.

Namun, sistem pajak Indonesia masih menghadapi beberapa kekurangan. Kompleksitas regulasi, rendahnya kepatuhan wajib pajak, birokrasi yang lamban, serta masih tingginya ketergantungan pada sektor informal menjadi tantangan utama. Selain itu, masih terdapat masalah dalam penegakan hukum pajak dan kurangnya transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan pajak.

Untuk mengoptimalkan sistem pajak dan mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045, beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain reformasi perpajakan dengan penyederhanaan aturan dan regulasi, serta memperluas basis pajak dengan mengintegrasikan sektor informal. Digitalisasi administrasi pajak melalui e-filing, e-payment, dan sistem pelaporan online, serta pemanfaatan big data untuk memantau aktivitas ekonomi dan mendeteksi kecurangan juga penting. Penguatan penegakan hukum melalui peningkatan kapasitas aparat dan penerapan sanksi tegas, serta kebijakan pajak yang progresif dengan kontribusi lebih besar dari wajib pajak berpenghasilan tinggi, dan memberikan insentif pajak untuk sektor strategis dan UKM juga diperlukan. Peningkatan kerja sama internasional untuk mengembangkan perjanjian perpajakan dan berpartisipasi dalam inisiatif global untuk transparansi pajak akan membantu meningkatkan pendapatan pajak secara signifikan (OECD, 2020).

Implementasi strategi-strategi ini akan membantu meningkatkan pendapatan pajak secara signifikan, memungkinkan pemerintah untuk mendanai berbagai program pembangunan yang esensial, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan sistem pajak yang optimal, Indonesia dapat lebih siap menghadapi tantangan global dan mencapai visi Indonesia Emas 2045.

**Daftar Pustaka**

Ali, Ichsanul Mutaqin, Lukman Yudho Prakoso, Dohar Sianturi. (2020). Strategi Pertahanan Laut Dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Maritim Di Wilayah Laut Indonesia. Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Vol.10 No.2 Edisi Mei 2022

Ardianto, E. (2018). Sistem Perpajakan di Indonesia: Teori dan Praktik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Ardiyanto, Agus. "Kebijakan Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus di Indonesia." Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, vol. 29, no. 2, 2020.

Arto, Rohman Soleh, Lukman Yudho Prakoso, Dohar Sianturi. (2019). Strategi Pertahanan Laut Indonesia Dalam Perspektif Maritim Menghadapi Globalisasi. Jurnal Prodi Strategi Pertahanan Laut Volume 5 Nomor 2

Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Peran Pajak dalam Pembangunan Nasional." Website Kemenkeu (https://www.kemenkeu.go.id).

Bank Indonesia. "Economic Reports on Indonesia." Bank Indonesia (https://www.bi.go.id).

Basri, M. C. (2017). Reformasi Perpajakan untuk Pertumbuhan Ekonomi. Jakarta: LP3ES.

Dipua, Angkasa , Rommy Hermawan, Dhiana Puspitawati, Nuddin Harahap, Dickry Rizanny Nurdiansyah, Lukman Yudho Prakoso. (2020). An Analysis Of The South China Sea Conflict: Indonesia’s Perspectives, Contexts And Recommendations PalArch Journal Archaeology of Egypt Page 17

Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Laporan Kinerja 2021. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Fahmi, I. (2019). Pajak dan Pembangunan Ekonomi. Bandung: Alfabeta.

Harjanto, B. (2020). Digitalisasi Administrasi Pajak: Tantangan dan Peluang. Jakarta: Salemba Empat.

Haryanto, Tri. "Kebijakan Fiskal untuk Mengurangi Ketimpangan Ekonomi." Jurnal Keuangan Publik, vol. 14, no. 3, 2018.

Indonesian Ministry of Finance. "Tax Reform and Economic Development: A Policy Review." Ministry of Finance Reports, 2021.

IMF. "Fiscal Monitor: Policies for the Recovery." International Monetary Fund, 2021. IMF (https://www.imf.org).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak 2021-2025. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Kurniawan, Cecep, Setyawan Widyarto, Lukman Yudho Prakoso. (2018). Implementasi Struktur Birokrasi Strategi Pertahanan Laut Menghadapi Ancaman Di Perairan Provinsi Sulawesi Tenggara Jurnal Strategi Pertahanan Laut Volume 4 Nomor 1

Kusuma, Andhika Wira, Lukman Yudho Prakoso, Dohar Sianturi. (2021). Relevansi Strategi Pertahanan Laut Berdasarkan Doktrin Jalesveva Jayamahe Terhadap Globalisasi Dan Perkembangan Lingkungan Strategis. Jurnal Prodi Strategi Pertahanan Laut Volume 6 Nomor 1

Listiyono, Yudi, Lukman Yudho Prakoso, Dohar Sianturi. (2019). Strategi Pertahanan Laut Dalam Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia Untuk Mewujudkan Keamanan Maritim Dan Mempertahankan Kedaulatan Indonesia. Jurnal Prodi Strategi Pertahanan Laut | Volume 5 Nomor 3.

Mankiw, N. Gregory. Principles of Economics. 8th ed., Cengage Learning, 2017.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2021). Revenue Statistics in Asian and Pacific Economies 2021. Paris: OECD Publishing.

OECD. "Revenue Statistics in Asian and Pacific Economies 2020." OECD Publishing, Paris, 2020. OECD iLibrary (<https://www.oecd-ilibrary.org>).

Piketty, Thomas. Capital in the Twenty-First Century. Harvard University Press, 2014.

Prasetyo, B. (2018). Pengaruh Pajak terhadap Pembangunan Nasional. Surabaya: Universitas Airlangga Press.

Prasetyo, Kuncoro Arry, Lukman Yudho Prakoso, Dohar Sianturi. (2019). Strategi Pertahanan Laut Pemerintah Indonesia Dalam Menjaga Keamanan Maritim. Jurnal Strategi Pertahanan Laut | Volume 5 Nomor 1

Prihantoro, Kasih, Suhirwan, Anton Iman Santosa, Budi Pramono, Guntur Eko Saputro, Rianto, Lukman Yudho Prakoso. (2021). Tourism Village Government Program, Characterized By State Defense as the Economic Foundation of National Defense. International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS) |Volume V, Issue V, May 2021|ISSN 2454-6186

Purnomo, H. (2020). Reformasi Pajak untuk Indonesia Emas 2045. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jakarta: Sekretariat Negara.

Romer, Paul. "Endogenous Technological Change." Journal of Political Economy, vol. 98, no. 5, 1990, pp. S71-S102.

Saputro, Guntur Eko, LukmanYudho Prakoso. (2021). Implementation of Economic Policies Facing Covid 19 in Supporting Nonmilitary Defense. International Journal of Social Science And Human Research Volume 04 Issue 04 DOI: 10.47191/ijsshr/v4-i4-11, Impact factor-5.586

Schwab, Klaus. The Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum, 2016.

Supriyono, Lukman Yudho Prakoso, Dohar Sianturi. (2019). Pentingnya Penanaman Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Masyarakat Pesisir Pulau Terdepan Sebagai Upaya Keikutsertaan Warga Negara Dalam Bela Negara. Jurnal Prodi Strategi Pertahanan Laut | Volume 5 Nomor 3.

Susanto, Y. (2019). Kebijakan Pajak dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Jakarta: Rajawali Pers.

Susilawati, Sri. "Infrastruktur dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia." Jurnal Ilmiah Ekonomi, vol. 25, no. 1, 2019.

World Bank. "Indonesia Economic Quarterly Reports." The World Bank Group, 2021. World Bank (https://www.worldbank.org).